



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 1

MANAJEMEN PERUBAHAN

- iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM**
 - b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

MANAJEMEN PERUBAHAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 1



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Tarnoto
Anggota



Debby
Anggota



Agung Wisnu Laksono
Anggota



Aria Yudha
Anggota

DAFTAR ISI

1. Monitoring ZI Januari - Juni 2024





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN JANUARI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas periode bulan Januari merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JANUARI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah disusun dan diajukan kepada Sekjen melalui Nota Dinas SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dalam bentuk draft, menunggu kompilasi dari semua area perubahan
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi sedang disusun
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pegawai untuk menentukan agent of change telah dilakukan Agent of Change akan diusulkan ke Sekjen untuk mendapat persetujuan dan penetapannya.
2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)			<ul style="list-style-type: none"> SOP Pusat TIK telah diinventarisasi, disusun, dan direview. Pengumpulan dokumen dan bukti dukung yang menunjukkan bahwa pustik telah



					melakukan inovasi selaras dengan SOP dan peta proses bisnis mulai dikumpulkan.
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan input data para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - pembuatan nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - inventarisir kebutuhan tampilan laman baru mkri - pembuatan <i>mock up</i> tampilan laman mkri



3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai • Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan dipersiapkan • Dokumen yang akan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di PUSTIK 2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi pegawai di PUSTIK 4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di PUSTIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai telah dikumpulkan • Akan dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penilaian Mandiri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai 2. Dokumen hasil Penilaian Mandiri 3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri



		d	Penetapan Kinerja Individu			<ul style="list-style-type: none"> • Cascading kinerja pegawai Pusat TIK telah disusun
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ • Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian			<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Akan ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> - Contoh SKP Bulanan, misalnya SKP Pak Sigit, Pak Mandiri, Pak Rosyid dan Bu Ulfa. - Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi terkait perencanaan telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut kinerja bisa dimasukkan bila ada. - Laporan kinerja anggaran bisa dimasukkan juga.



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Public Campaign inspektorat melalui signage sebagai evidence. - Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan KPK. - Laporan inspektorat terkait pengendalian gratifikasi.
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan SOP, Soft Control, Kode Etik, Pakta Integritas, - Pembuatan manajemen risiko PUSTIK dan rencana tindak pengendalian
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> - SK PIC Lapor per unit kerja, jalur pengaduan, SP4N Lapor, SOP Penanganan Pengadaan, SK Tim penanganan pengadaan - Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah ditindaklanjuti, contoh Survei Eksternal →



						Hubungi MK di web, Survei Internal → Troubleshoot
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Januari ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Januari 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk995553633240709033119](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN FEBRUARI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Februari merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE FEBRUARI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. • Pengumpulan dokumen dan bukti dukung yang menunjukkan bahwa pustik telah melakukan inovasi selaras dengan SOP dan peta proses bisnis mulai dikumpulkan.
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan input data para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - pembuatan nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id:



					<ul style="list-style-type: none"> - inventarisir kebutuhan tampilan laman baru mkri - pembuatan <i>mock up</i> tampilan laman mkri - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri (sedang proses)
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai • Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan dipersiapkan • Dokumen yang akan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di PUSTIK 2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi pegawai di PUSTIK 4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di PUSTIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai telah dikumpulkan



					<ul style="list-style-type: none"> Akan dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Penilaian Mandiri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Dokumen hasil Penilaian Mandiri 3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah



					<p>dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut kinerja bisa dimasukkan bila ada. - Laporan kinerja anggaran bisa dimasukkan juga. - Capture serapan anggaran yang ada di website utama MK (MKRI.ID)
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Public Campaign inspektorat melalui signage sebagai evidence. - Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan KPK. - Laporan inspektorat terkait pengendalian gratifikasi.
		b	Penerapan SPIP		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan SOP, Soft Control & Hard Control, Kode Etik, Pakta Integritas, SK Tim SPIP per unit kerja (SPIP terintegrasi ke depannya)



					<ul style="list-style-type: none"> - Review kembali manajemen resiko yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
		c	Pengaduan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah ditindaklanjuti
		d	Whistle-Blowing System		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan • Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> • Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Februari ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Februari 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 29 Februari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk995553633240709033443](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN MARET 2024

I. LATAR BELAKANG

Pada bulan Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengalihkan fokusnya sementara pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. Namun demikian, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tetap dilanjutkan. Proses Pembangunan yang berlangsung di unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Maret disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MARET 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan <i>agent of change</i> telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri (sedang proses)
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai



		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK • Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Maret ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Maret 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 29 Maret 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-507717779240709035616



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN APRIL 2024

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenaga pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Di sisi lain, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tidak berhenti berlangsung. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan April disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE APRIL 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan <i>agent of change</i> telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai



		b	Pola Mutasi Internal			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian			<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK • Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan April ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan April 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 30 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-151477269240709040107



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN MEI 2024

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenaga pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan Mei 2024. Begitu pula dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menjadi komitmen Bersama seluruh pegawai di Pusat TIK. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Mei 2024 disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MEI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi per bulan dan per triwulan sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi laman mkri baru
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Montoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK



		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat



		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Mei ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Mei 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-1475085605240709034601



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN JUNI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pola kerja di Mahkamah Konstitusi telah berangsur kembali normal setelah berakhirnya masa penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan Juni 2024. Namun begitu, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi masih butuh perjalanan panjang untuk bisa terselesaikan. Proses yang telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai di Pusat TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Juni 2024 disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JUNI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi per bulan dan per triwulan sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi laman mkri baru
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan telah dilakukan
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Montoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK



		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat



		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal telah dilakukan dengan Inspektorat dan Peraturan Sekjen tersebut telah ditandatangani Sosialisasi Peraturan terkait benturan kepentingan telah dilaksanakan dan proses penanganan benturan kepentingan telah dimulai. Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat



6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan telah disosialisasikan dan telah dibuatkan maklumatnya pada laman resmi MKRI dan di microsite
		b	Budaya Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan telah disusun termasuk pemberian kompensasi bagi penerima layanan atas pelayanan yang di bawah standar • Telah dilakukan sosialisasi dan publikasi pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Juni ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Juni 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-387448336240709035824